

MENYOAL TATAKELOLA UNIVERSITAS DALAM KONTEKS & POTENSI PENYIMPANGAN

Sulistyowati Irianto
Fakultas Hukum -UI
27 Agst 2022



Pengantar

- Esensi ilmu pengetahuan, universitas dan ilmuwan
- Otonomi dan tatakelola
- Penafsiran keliru para pihak: pemerintah, universitas, masyarakat & industri/korporasi
- Pendidikan tinggi berkualitas butuh dana mahal
- Sistem check & balances harus dibenahi



FUNDAMENTAL PRINCIPLES –Autonomy & Good university governance

- The University is an *autonomous institution* at the heart of societies differently organized because of geography and historical heritage; it produces, examines, appraises and hands down *culture by research and teaching*
- To meet the needs of the world around it, its research and teaching must be *morally and intellectually independent of all political authority and economic power*
- Otonomi & Tatakelola universitas → dua sisi *coin*
- Tatakelola universitas (transparant & akuntabel)– ada uang publik.
- Bila tatakelola tidak berjalan, berarti otonomi telah disalahgunakan

SALAH TAFSIR KONSEP OTONOMI UNIVERSITAS

- Stakeholder universitas:
 - Pemerintah: otonomi= cari uang sendiri (biaya pendidikan & rekrutmen dosen)
 - Civitas akademika universitas: kebebasan akademik yg didukung
 - Masyarakat: uang kuliah semakin mahal
 - Industri & korporasi: bikin universitas sendiri
- Memiliki kepentingan beragam, mempengaruhi pandangan thdp universitas



PENDIDIKAN TINGGI BERKUALITAS BUTUH DANA BESAR

- Berapa biaya mendidik seorang mahasiswa di PT ?
- Contoh mhswa kedokteran UI (plg murah)
 - - pre klinik: Rp 50 juta lebih/tahun (3 thn)
 - -klinik: co-as & internship: Rp 28 juta –tanpa biaya honor dosen (2 thn)
- Total 206 juta
- Uang kuliah *:
 - 12 x 7,5 juta= Rp 90 juta
 - BOP (subsidi pemerintah) : ?
- Masih kurang utk penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- Siapa yang nomboki ? DOSEN yg bersedia dibayar murah
- Siapa bertgjawab ? Pemerintah, masyarakat, industri ?

Para dosen: siapa mereka ?

Sejarah: Pendidikan (tinggi) kolonial – untuk birokrasi

Sekolah Kedokteran

- Kursus juru kesehatan – 1849 → mantri cacar
- Sekolah Dokter Djawa – 1853 (utk mencukupi nakes, kekurangan dokter Belanda)
- *School tot Opleiding van Inlandsche Geneeskundigen* 1889
- *School tot Opleiding van Artsen* -1898
- *School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA)* – 1902
- *Geneeskundigen Hogeschool* -1927
- Fakultas Kedokteran UI -1950

Sekolah Hukum

- *Rechtschool* -1909 --tenaga hukum pengadilan kabupaten Lebak
- *Rechtshogeschool/ Faculteit der Rechtsgeleerdheid* – 28 Okt 1924
- *Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen* – 1946
- *Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan* – UI- 1950
- Dipecah menjadi *Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial* - 1968

Kendala birokrasi

- (1) standardisasi capaian dan akreditasi universitas, fakultas, prodi, laboratorium, pusat riset diukur dengan parameter administratif yang tidak memberdayakan
- (2) Cara pikir monodisiplin yang membatu, sukar menerima paradigma baru (interdisiplin) yg tidak sejalan dng regulasi dan akreditasi yang kuno → di LN ada mk “law & technology”, “law, arts & science”, “access to justice & technology
- (3) Ketidadaan hubungan antara universitas dan industri
- (4) Pembiaran terhadap pascasarjana
- (5) ketidadaan disain riset dan pengmas nasional jangka panjang dan visioner → maka diberikan amat menyebar untuk riset kecil-kecil, sporadis, dan tidak terkoneksi satu sama lain.
- (6) Birokratisasi tatakelola keuangan berlebihan. Rezim regulasi keuangan negara = univ adl kantor jawatan pemerintah. Akibatnya tatakelola Univ yg transparan dan akuntabel= sekedar “ada kuitansinya”

Realitas ilmuwan kita ?

- Mengabdikan kepada birokrasi
 - Kehilangan daya kritis untuk mengkritisi kebijakan → tidak *speaking up* untuk isu kemanusiaan dan pemerintahan bersih
 - Menjadi formalis (berlebihan) – macam2 isian borang, BKD, Simlibtamas, Sipeg, BRP
 - Orientasinya naik pangkat: mengejar jadi profesor (bukan pengembangan ilmu) → implikasi: swa plagiat, kecurangan2
- Mudah terseret ke dalam politik praktis
- Mental priyayi:
 - Mendambakan jadi pejabat
 - Kurang minat turun ke masyarakat, bekerjasama dengan NGO atau aktivis masyarakat –
- NIR budaya akademik
 - **MENGAPA ?**



Potensi Korupsi

Korupsi uang:

- Ketidadaan tatakelola perguruan tinggi (transparan & akuntabel)
 - uang penerimaan mahasiswa baru
 - kemandirian = terima mahasiswa sebanyaknya
 - Prestasi fakultas & prodi: banyaknya mahasiswa, bukan pengembangan keilmuan
- Korupsi Politik
 - “menjual” gelar profesor kehormatan kepada para pemilik kuasa & uang
 - terlibat dalam gerakan politik praktis

Epilog

- Ciptakan sistem check & balances yang baik dalam tatakelola universitas
- Fungsikan dengan baik utk check & balances, academic misconduct: MWA, Senat, Dewan Guru Besar, Ombudsman universitas
- Kembali ke “khitah”/ prinsip dasar universitas: ilmuwan harus bebas dari kepentingan politik dan uang



• terima
kasih